

SISTEM KOMUNIKASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PADA PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) PROVINSI PAPUA

Yuni Mogot¹, Husnita²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia,
Jl. Dipati Ukur No. 112-116 Bandung 40132¹, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma,
Tugu, Cimanggis, Depok City, West Java 16451²

E-mail:

yuni.mogot@email.unikom.ac.id¹

husnita@staff.gunadarma.ac.id²

Abstract

Sustainable Development Goals (SDGs) are sustainable development programs which are implemented globally around the world until 2030. Indonesia as a member of the United Nations, is committed to supporting this program through Presidential Regulation No. 59 of 2017 concerning SDGs and their follow-up. Based on data from Bappenas on May 2020, it was recorded that only 25 provinces had finished preparing Regional Action Plan (RAD) as well as the issuance of related regional regulation. Papua Province is one of provinces which cannot complete the development of Regional Action Plan (RAD) in accordance to time which is specified in the SDGs program.

The constructivist paradigm was used in this study with qualitative descriptive approach as the method. The research subjects were the Expert Staff of the SDGs Program Implementation Team from Bappenas, the Manager of the Economic Pillars of the SDGs National Secretariat, the staff of the Papua Province Bappeda, and the Managing Editor of merdeka.com. Meanwhile the research objects were government communication system, information flow within government communication system, and communication's obstacle related to the development of RAD in Papua Province. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, literature reviews, online studies, literature studies, field studies, and documentation. Data validity test were carried out by triangulation technique and membercheck.

The result of this study (1) The Papua Province government communication system in the preparation of the Regional Action Plan is to create an organization that forms an information environment among the appointed pillars in the preparation of the Regional Action Plan in Papua Province (2) The flow of the Papua Province government communication system is centralized or top down. Information from Bappenas is always the main person in charge of becoming a benchmark in preparing regional action plans. (3) communication barriers in the Papua Provincial government's communication system related to the preparation of Regional Action Plans are budget issues and understanding of the SDGs themselves.

Keywords: Government Communication System, SDGs, Papua Province.

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan berkelanjutan yang saat ini dilaksanakan secara global di seluruh dunia sampai dengan tahun 2030 mendatang. Indonesia sebagai anggota PBB berkomitmen untuk mendukung program tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang SDGs dan tindak lanjutnya. Berdasarkan data dari Bappenas bulan Mei 2020, tercatat baru 25 provinsi yang telah selesai menyusun

Rencana Aksi Daerah (RAD) sekaligus menerbitkan peraturan daerah terkait. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang tidak dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan pada program SDGs.

Paradigma konstruktivis digunakan pada penelitian ini, dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi Subjek Penelitian adalah Staf Ahli Tim Pelaksana Program SDGs dari Bappenas, Manager Pilar Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs, Staf Bappeda Provinsi Papua, dan Redaktur Pelaksana *merdeka.com*. Sementara yang menjadi Objek Penelitian adalah Sistem Komunikasi Pemerintah, Aliran Informasi dalam Sistem Komunikasi Pemerintah, serta Hambatan Komunikasi terkait penyusunan RAD di Provinsi Papua. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui wawancara mendalam, tinjauan pustaka, studi daring, studi pustaka, studi lapangan, dan dokumentasi. Sementara Uji Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi dan *membercheck*.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Sistem komunikasi pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan RAD adalah menciptakan organisasi yang membentuk lingkungan informasi di antara pilar yang telah ditunjuk dalam penyusunan RAD di Provinsi Papua, (2) Aliran sistem komunikasi pemerintah Provinsi Papua bersifat sentralisasi atau *top down*. Informasi dari Bappenas selaku penanggungjawab utama menjadi tolak ukur dalam penyusunan RAD, (3) Hambatan komunikasi dalam sistem komunikasi pemerintah Provinsi Papua terkait penyusunan RAD terletak pada hambatan semantik, ketiadaan anggaran, dan kurangnya pemahaman terhadap program SDGs tersebut.

Kata Kunci: Sistem Komunikasi Pemerintah, SDGs, Provinsi Papua

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Saat ini dunia Internasional sedang bersama-sama melaksanakan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Program pembangunan global ini dilaksanakan hingga tahun 2030, yang pada dasarnya adalah kelanjutan dari program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Pada sidang umum PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang berlangsung bulan September 2015, telah menyepakati bahwa terdapat 17 tujuan pembangunan global dengan 169 target, menggunakan 241 indikator.

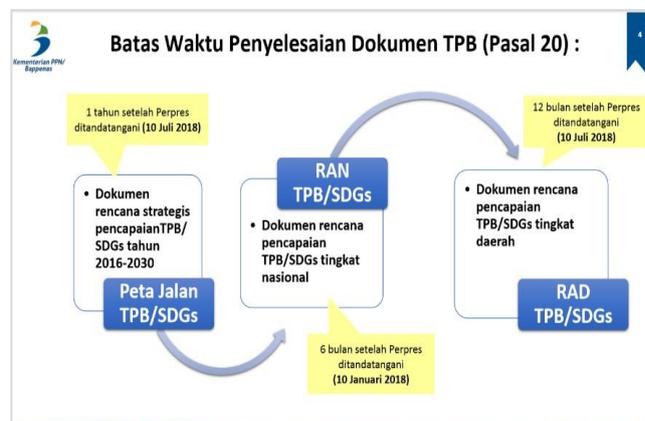
Sebagaimana dikutip dari laman <http://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut adalah (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kestaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Indonesia sebagai bagian dari anggota PBB, berkomitmen untuk mendukung program SDGs melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang SDGs dan Tindak lanjutnya. Realisasinya dibentuk Tim Koordinasi Nasional SDGs dibawah koordinasi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Selain untuk menyelaraskan tujuan pembangun jangka menengah dan jangka Panjang Peraturan Presiden tersebut juga untuk memenuhi target yang telah ditetapkan hingga tahun 2030.

Pelaksanaan target SDGs berisi dokumen Rencana Aksi Nasional yang disusun oleh Tim Pelaksana Bersama Kelompok Kerja yang terdiri dari 4 (empat) pilar pembangunan yang beranggotakan (1) Kementerian/lembaga terkait serta aktor non- pemerintah (*non-state actor*), yaitu Filantropi, Pelaku Dunia Usaha (2) Akademisi, (3) Organisasi Masyarakat dan (4) Media. Sementara Rencana Aksi Daerah disusun oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/ Kabupaten dan aktor non pemerintah. Partisipasi aktor non pemerintah dalam pelaksanaan SDGs ini merupakan perwujudan dari prinsip '*no-one left behind*' yang memastikan seluruh pihak terlibat dan memberikan manfaat bagi semua, terutama yang rentan. Mereka yang termasuk rentan, dalam konteks ini adalah kelompok difabel, anak, perempuan, dan pemuda. Jangka waktu penyusunan Aksi Nasional dan Aksi Daerah ini masing-masing 6 (enam) bulan dan 12 bulan setelah Perpres 59/2017 ditandatangani. Artinya, bulan Januari 2019 dan Juni 2019 telah selesai disusun.

Gambar 1.1. Kerangka Waktu Penyelesaian RAN, RAD dan Peta Jalan



Sumber: Paparan Metadata Untuk Penyusunan Rencana Aksi yang Partisipatif oleh Setyo Budiantoro, Manager Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat TPB/SDGs, Kementerian PPN/Bappenas pada Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk SDGs, Jakarta, 14-15 November 2017

Berdasarkan data dari Bappenas bulan Mei 2020, tercatat baru 25 (dua puluh lima) provinsi yang telah selesai menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dan sekaligus menerbitkan peraturan daerah. Artinya masih ada 9 (sembilan) provinsi yang belum menyelesaikan Rencana Aksi Daerah-nya. Salah satu dari 9 (sembilan) itu adalah provinsi terluas paling timur di Indonesia yaitu Provinsi Papua.

Kendala yang ditemui pada saat dilakukan observasi pendahuluan adalah minimnya pemahaman petugas tentang SDGs. Sehingga langkah-langkah serta unsur-unsur yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah ini tidak disediakan, salah satu contohnya adalah ketersediaan anggaran. Namun dengan segala upaya dan kolaborasi dari 4 pilar yang telah ditetapkan diawal maka hingga bulan November 2020 rencana aksi masih dalam proses penetapan peraturan pemerintah daerah atau setara dengan Gubernur.

Peneliti memandang berbagai kendala yang ditemui adalah kesenjangan komunikasi dalam menyampaikan pesan tentang program SDGs dan pentingnya menyusun rencana aksi daerah. Menurut Hasan (2005), jika dipandang dari sudut kajian Komunikasi Pemerintah, ada yang disebut dengan komunikasi informasi dalam hubungan kerja pemerintah. Komunikasi informasi merupakan penyampaian pesan dari pimpinan kepada unit kerja yang berada dalam lingkungannya dengan harapan mendapatkan kesamaan makna dari pesan tersebut. Keterlambatan penyusunan

rencana aksi daerah di Provinsi Papua kemungkinan disebabkan adanya masalah sistem komunikasi yang terjadi diantara lembaga yang bertanggung. Selain kendala sistem komunikasi, dalam observasi awal juga terlihat bagaimana sistem birokrasi yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mendalami permasalahan dalam program SDGs terutama mengenai penyusunan Rencana Aksi Daerah khususnya di Provinsi Papua, dengan judul penelitian “Sistem Komunikasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah pada Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Papua”.

1.2. Rumusan Masalah

Secara umum penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana Sistem Komunikasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah pada Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Papua ?

Secara khusus rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sistem komunikasi, aliran komunikasi, dan hambatan komunikasi yang terjadi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah pada Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Papua ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Komunikasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah pada Program *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem komunikasi, aliran komunikasi, dan hambatan komunikasi yang

terjadi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah pada Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Provinsi Papua.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Sistem Komunikasi Pemerintah

Pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai hubungan seperangkat unsur yang secara teratur dan saling mempunyai keterkaitan, sehingga dapat membentuk totalitas yang sempurna dan rapi. Menurut Tatang M Amirin (dalam Nurudin, 2004:4), Sistem adalah sekumpulan unsur yang melakukan kegiatan atau menyusun skema dalam melakukan tata cara pemrosesan kegiatan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan. Sementara itu, menurut Pamudji (dalam Syafiie dan Azhari, 2006) Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Hakekat komunikasi pemerintahan adalah menjamin berjalannya fungsi pemerintahan melalui keterampilan berkomunikasi, terkait kepentingan masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup sebaik-baiknya dengan tidak merugikan pihak manapun (Hasan, 2005: xi). Komunikasi pemerintahan dapat dipandang dari hubungan pemerintah dengan publik, bagaimana pemerintah membangun reputasi di mata publik

Sistem Komunikasi Pemerintah adalah suatu proses keteraturan dalam unsur pemerintah dengan membangun pola atau aliran komunikasi secara timbal balik dengan masyarakat dalam rangka

membangun reputasi dari pemerintah tersebut. Komunikasi Pemerintahan juga merupakan penyampaian ide, program, dan gagasan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan tersebut. Dalam konteks komunikasi, pemerintah dapat diasumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan, namun dalam suasana tertentu bisa terjadi sebaliknya masyarakat berada pada posisi sebagai penyampai pesan atau gagasan dan pemerintah berada pada posisi mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Dalam kondisi yang demikian pemerintah memiliki kewenangan sekaligus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan, bahkan merespon keinginan-keinginan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan wewenang dan posisinya dalam struktur organisasi pemerintah cenderung lebih banyak memberitahu (*telling*) bukan mendengarkan (*listening*), sebaliknya bawahan mungkin mengatakan kepada atasan mereka apa yang mereka harapkan didengar oleh atasannya, jadi perbedaan status antara *sender* dan *receiver* dapat menjadi hambatan bagi proses komunikasi yang efektif. Oleh sebab itu untuk menciptakan komunikasi efektif perlu dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana dikemukakan oleh Gibson (1984:14), yakni: (1) Mengadakan tindakan langsung (*following up*), (2) Mengatur arus informasi (*regulation information flow*), (3) Memanfaatkan umpan balik (*utilizing feedback*), (4) Pengahayatan (*empathy*), (5) Pengulangan (*repetition*), (6) Mendorong saling mempercayai (*encouraging mutual trust*), (7) Penetapan waktu secara efektif (*effective timing*), (8) Menyederhanakan bahasa, (9) Mendengarkan secara efektif, dan (10) Memanfaatkan selentingan. Sementara itu, terdapat 5 (lima) faktor yang

dianggap paling potensial untuk kelancaran dan efektifitas komunikasi, yakni mencakup: (1) Komunikasi atasan dengan bawahan, (2) Komunikasi ke bawah, (3) Persepsi mengenai komunikasi dengan bawahan, (4) komunikasi ke atas, serta (5) Keandalan informasi.

2.2. Arah Aliran Informasi Komunikasi Pemerintah

Pace dan Faules (2018:183-184) menjelaskan bahwa dalam komunikasi organisasi, informasi dapat berpindah secara formal dari seseorang yang otoritasnya lebih tinggi kepada orang yang otoritasnya lebih rendah, dari satu jabatan yang memiliki otoritas lebih rendah ke otoritas yang lebih tinggi, orang-orang yang memiliki otoritas yang sama, atau bergerak di antara orang-orang atau jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan ataupun bawahan dan mereka menempati bagian fungsional yang berbeda.

- a. Komunikasi ke bawah. Informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang memiliki otoritas lebih rendah. Menurut Pace dan Faules (2018:185) ada lima jenis informasi yang biasa dikomunikasikan dari atasan ke bawahan:
- Informasi bagaimana melakukan pekerjaan
 - Informasi dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan
 - Informasi kebijakan dan praktik-praktik organisasi
 - Informasi kinerja pegawai
 - Informasi mengembangkan rasa memiliki (*sense of mission*)
- b. Komunikasi ke atas. Informasi mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Komunikasi ke atas menjadi sebuah hal yang penting karena

beberapa hal:

- Aliran informasi ke atas memberi informasi berharga bagi pembuatan keputusan yang dilakukan oleh mereka yang mengarahkan organisasi dan mengawasi kegiatan orang-orang lainnya
- Komunikasi ke atas memberitahukan kepada atasan kapan bawahan siap menerima informasi dan tingkat penerimaan informasi tersebut oleh bawahan
- Komunikasi ke atas memungkinkan, bahkan memotivasi, munculnya keluhan (*complaint*) sehingga penyelia mengetahui sebenarnya hal terdekat yang mengganggu operasional
- Komunikasi ke atas menumbuhkan rasa apresiasi dan loyalitas kepada organisasi melalui kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan menyumbang gagasan serta saran terkait operasional organisasi
- Komunikasi ke atas membantu pegawai mengatasi masalah pekerjaan dan memperkuat keterlibatan dengan pekerjaannya dalam organisasi

2.3. Hambatan dan Dukungan dalam Komunikasi Pemerintah

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pendengarnya (orang-orang yang sedang berkomunikasi). Kesamaan dalam hal tertentu misalnya bahasa, tingkat pendidikan ataupun tingkat ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik, sehingga komunikasi yang dilakukan bisa lebih efektif.

Mulyana (2013:64) menyatakan, hambatan dalam berkomunikasi dapat

disebabkan beberapa hal, antara lain: gangguan semantik dan mekanik, kepentingan, motivasi terpendam, dan adanya prasangka. Sementara Hasan (2014) menyatakan tercapainya komunikasi efektif dipengaruhi beberapa hal, antara lain: perbedaan latar belakang, faktor bahasa, sikap pada waktu berkomunikasi, dan faktor lingkungan. Faktor penghambat lainnya, diantaranya adalah: hambatan sosio-antropologis (situasional), dan hambatan ekologis. Dalam konteks komunikasi, komunikator harus memerhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung serta memerhatikan kondisi lingkungan sekitarnya.

Menurut Rudy (2015:25), hambatan komunikasi dapat ditimbulkan pula oleh hambatan yang bersifat organisasional, mencakup: *Management levels* (tingkatan manajemen), *Number of people supervised* (jumlah staf atau orang-orang yang berada dalam kendali atau di bawah pengawasannya), *The rank of position in the organization* (jenjang kepangkatan, jabatan, dan status atau kedudukan di dalam organisasi), *Change in managers* (pergantian manajer), dan *Managers interpretation* (penafsiran manajer).

Masing-masing pimpinan dalam organisasi mempunyai pola pikir, cara menafsirkan, dan pola bergaul yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Seorang pimpinan dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi kepada bawahannya, untuk tercapainya komunikasi efektif di lingkungan organisasi di mana ia berada.

2.4. Pendekatan Komunikasi dalam Pembangunan

Di antara upaya untuk merumuskan

pengertian komunikasi pembangunan, Quebral dan Gomez (1976) menyatakan bahwa komunikasi pembangunan dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi agar kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan dapat dihapuskan. Bentuk komunikasi yang diutamakan adalah mendidik dan memotivasi masyarakat agar gagasan, sikap, mental serta keterampilan penduduk sebuah negara semakin maju dan berkembang. Dapat diartikan, komunikasi pembangunan adalah komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana mensejahterakan masyarakat suatu negara.

Berikut ini beberapa pendekatan komunikasi dalam pembangunan yang disampaikan para pakar (a). Hedebro, 1979 dalam Nasution, 1996: 86-89) mengidentifikasi tiga aspek pendekatan komunikasi dalam pembangunan, yaitu: bagaimana media massa dapat menyumbang ide dalam upaya pembangunan, bagaimana media massa menjadi pendidik yang dapat mengajarkan kepada masyarakat tentang berbagai keterampilan dan perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa dengan konsentrasi dan bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai untuk mempromosikan ide-ide baru dan lain-lain. (b) Schramm (1964), mempunyai pandangan bahwa untuk merumuskan tugas pokok komunikasi dalam rangka pembangunan nasional, pendekatan yang dilakukan dapat dengan penggunaan media massa. Sehubungan dengan itu, Schramm menjelaskan bahwa media massa berfungsi sebagai (1) sumber informasi yang diharapkan dapat menyampaikan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat (2) pembuat keputusan, dalam hal ini media massa berperan sebagai penujung munculnya kelompok-kelompok diskusi

yang akan memperbincangkan informasi yang disampaikan media dan selanjutnya membuat sebuah keputusan dan (3) sebagai pendidik. media massa bisa jadi media pendidikan dengan memuat siaran-siaran pendidikan.

Peran media massa dalam pembangunan nasional adalah *agent of social change*. Letak peranannya adalah dalam hal membantu mempercepat proses peralihan masyarakat yang tradisional menjadi masyarakat yang modern. Khususnya peralihan dari kebiasaan-kebiasaan yang menghambat pembangunan kearah sikap yang baru yang tanggap terhadap pembaharuan demi pembangunan. Kedua pendapat diatas, tampaknya pendekatan yang dilakukan lebih berorientasi pada pendekatan penggunaan media massa dan peranannya dalam pembangunan. Dapat dikatakan kedua Pendekatan yang disampaikan di titik beratkan kepada unsur tehnik komunikasinya.

2.5. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah sebuah istilah yang menjelaskan program pembangunan global yang ditargetkan berakhir pada tahun 2030. Tujuan pembangunan dalam program SDGs terdiri dari 17 poin, yaitu: Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kesehatan, Pendidikan, Kesetaraan Gender, Sanitasi dan Akses Air Bersih, Energi Bersih dan Terjangkau, Ekonomi dan Pekerjaan Layak, Industri, Inovasi and Infrastruktur, Mengurangi Kesenjangan, Kota dan Komunitas Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab, Aksi Perubahan Iklim, Ekosistem Air, Ekosistem Darat, Perdamaian, Keadilan dan Institusi

yang Kuat, dan Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan. Sebagaimana tercantum pada Logo SDGs di bawah ini:

Gambar 2.1. Logo *Sustainable Development Goals* (SDGs)



Sumber:

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/News/communications-material/>

Diakses 1 Maret 2019 pukul 19.30 WIB

Adapun prinsip pelaksanaan SDGs, sebagaimana dikutip dari laman <https://www.icctf.or.id/sdgs/>, adalah:

- a) *Universal*: dilaksanakan oleh seluruh dunia terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang
- b) *Integration*: dilaksanakan secara terintegrasi pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan (saling terkait)
- c) *No-One Left Behind*: Dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memberi manfaat bagi semua terutama yang rentan. *)

SDGs memiliki beberapa istilah seperti Agenda Pembangunan Pasca 2015 dan Agenda Pembangunan Global mulai dilaksanakan pada tahun 2016 dan didukung oleh beberapa perjanjian Internasional dalam rangka bantuan dana seperti *Addis Abbaba Action Agenda*. Kerangka Kerja *Sendai* yang turut mendukung peran pemerintah daerah dalam masa tanggap darurat, Perjanjian Paris untuk peran

pemerintah sub nasional dalam menangani perubahan iklim dan Agenda Urban Baru untuk memandu pemerintah daerah dalam melaksanakan TPB/SDGs.

2.6. Teori Informasi Organisasi

Teori Informasi Organisasi dikembangkan oleh Karl Weick (1979), menggunakan komunikasi sebagai dasar bagi pengorganisasian manusia dan memberikan dasar pemikiran untuk memahami cara-cara manusia berorganisasi. Menurut teori ini organisasi bukanlah susunan yang terbentuk oleh posisi dan peranan melainkan oleh aktivitas komunikasi. Organisasi merupakan sesuatu yang dicapai manusia melalui sebuah proses komunikasi yang berkelanjutan. Ketika manusia melakukan interaksi sehari-hari, mereka “menciptakan” organisasi. Semua perilaku manusia saling dihubungkan karena perilaku seseorang tergantung kepada perilaku orang lain. (Littlejohn dan Foss, 2009:364).

Pengorganisasian menurut Weick mempunyai arti penting dalam bidang komunikasi karena pengorganisasian adalah tentang komunikasi manusia dan memberikan dasar logika untuk memahami bagaimana orang berorganisasi. Tugas organisasi berkaitan dengan upaya mengartikan pesan yang diterima serta menentukan orang-orang yang tepat dalam menerima informasi tersebut sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Menurut Weick, sebagai sebuah sistem dimana didalamnya terlibat proses aktivitas untuk mempertahankan fungsi dan keberadaannya, organisasi memiliki prosedur untuk menangani semua informasi yang harus dikirim dan diterima dalam upaya mencapai tujuannya. Sebagai sebuah sistem, organisasi terdiri atas orang dan tim

yang satu sama lain saling terhubung yang juga saling tergantung dalam memenuhi tujuannya. (West dan Turner, 2008:334-339).

Teori Informasi Organisasi berfokus pada proses pengorganisasian anggota organisasi untuk mengelola informasi daripada berfokus pada struktur organisasi itu sendiri. Sejumlah asumsi yang mendasari teori ini adalah (West & Turner, 2008:339):

1. Organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan informasi
2. Informasi yang diterima sebuah organisasi berbeda dalam hal ketidaktejasannya
3. Organisasi manusia terlibat di dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidaktejasan informasi

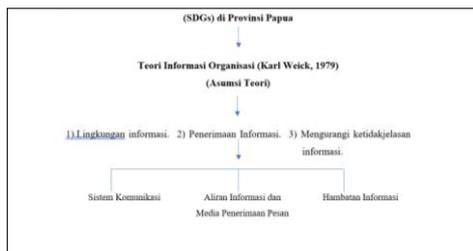
Ketiga asumsi dari teori ini menyatakan bahwa organisasi bergantung pada informasi dan lingkungan informasi sebagai sesuatu yang berbeda dari lingkungan fisik dimana keberadaan organisasi dapat menimbulkan ambiguitas informasi sehingga organisasi memulai aktivitas kerjasama untuk membuat informasi yang diterima dapat lebih dipahami. Weick melihat proses mengurangi ketidaktejasan sebagai suatu aktivitas bersama diantara anggota organisasi.

Teori Informasi Organisasi dari Weick digunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka teoritis yang kuat untuk menjelaskan cara organisasi memahami informasi yang diterimanya bagi keberadaan organisasi tersebut. Terkadang informasi yang diterima oleh sebuah organisasi bersifat ambigu dan membutuhkan suatu sistem informasi organisasional yang jelas untuk mengurangi keambiguitasan tersebut. Lingkup sebuah organisasi disini adalah keseluruhan sistem yang ada seperti sumber daya manusia, lingkungan, dan *stakeholder*.

Adapun Kerangka Pemikiran penelitian

ini, dapat digambarkan pada bagan berikut ini:

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti

Penelitian ini menggali komunikasi yang dilakukan pada lingkungan pemerintah Provinsi Papua dalam menjalankan program SDGs penyusunan rencana aksi daerah. Menggunakan asumsi dari Teori Organisasi Informasi dari Karl Weick, 1979 penulis ingin melihat bagaimana lingkungan informasi dalam pemerintah Provinsi Papua saat penyusunan rencana aksi daerah, bagaimana aliran komunikasinya dan hambatan yang berasal dari ketidakjelasan yang muncul.

3. Objek dan Metode Penelitian

Objek penelitian dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya. Objek penelitian adalah mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu (Sugiyono 2010:41). Sedangkan informan penelitian menurut Bungin (2010:78) adalah subjek yang memahami objek penelitian.

Objek pada penelitian adalah situasi sosial yang ingin diketahui, ditelaah dan diamati oleh peneliti untuk mencari tahu apa yang terjadi. Peneliti ingin mendalami perkembangan pelaksanaan program SDGs di Provinsi Papua terkait sistem komunikasi,

aliran komunikasi dan hambatan komunikasi yang terjadi dalam penyusunan rencana aksi daerah.

Subjek dalam penelitian ini adalah Staf Ahli Tim Pelaksana Program SDGs dari Bappenas, Manager Pilar Ekonomi Sekretariat Nasional SDGs, Staf Bappeda Provinsi Papua dan Redaktur Pelaksana merdeka.com.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003:3). Alasan penulis menggunakan paradigma penelitian konstruktivis karena penulis memandang bahwa pengalaman setiap individu dalam sistem komunikasi pemerintah Provinsi Papua dalam penyusunan rencana aksi daerah adalah sebuah hal yang unik dan perlu dihargai sebagai bagian dari pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, tinjauan pustaka, studi daring, studi pustaka, studi lapangan dan dokumentasi. Sementara uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, yang merupakan cara paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Penerbitan Perpres No 59 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dilaksanakan dalam kurun waktu 12 bulan. Berdasarkan wawancara dengan informan dari Sekretariat SDGs, sosialisasi, pendampingan dan konsultasi

dilakukan beberapa kali kepada seluruh Bappeda dari 34 provinsi. Provinsi Papua adalah salah satu Pemerintah Daerah yang tidak dapat memenuhi tenggang waktu penyusunan RAD yang harusnya selesai dalam waktu 12 bulan setelah ditetapkannya Perpres No 59/2017.

Merujuk pada Teori Informasi Organisasi menurut Weick, organisasi tidak hanya dihadapkan pada tugas untuk mengartikan pesan yang diterima, tetapi juga menghadapi tantangan untuk menentukan siapa yang harus menerima informasi tersebut demi mencapai tujuan organisasi.

4.1. Sistem Komunikasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pada Program SDGs Provinsi Papua

Pemerintah Daerah Provinsi menerima informasi terkait penyusunan RAD TPB/SDGs dari Pemerintah Pusat. Bappenas adalah leading sector pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia. Lebih lanjut, informan dari Bappenas mengatakan bahwa Bappenas dalam mengusulkan tujuan, target dan indikator pun berdasarkan hasil dari diskusi pada tingkat nasional yang melibatkan akademisi, organisasi masyarakat serta kementerian dan berbagai lembaga. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan TPB/SDGs dan melakukan serangkaian pertemuan, sosialisasi, dan *Focus Discussion Group* kepada seluruh pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk memperkenalkan TPB/SDGs sekaligus merumuskan indikator dan metadata (informasi terstruktur terkait indikator).

Menurut Weick, organisasi sebagai sebuah sistem dimana didalamnya terlibat proses aktivitas untuk mempertahankan fungsi dan keberadaannya, organisasi memiliki prosedur untuk menangani semua informasi yang harus dikirim dan diterima dalam upaya

mencapai tujuannya (West dan Turner, 2008:334). Merujuk pada pernyataan tersebut, peneliti berpendapat bahwa pertemuan, sosialisasi, dan *Focus Discussion Group* adalah cara Bappenas sebagai komunikator utama di Indonesia dalam menjalankan prosedur terkait penanganan semua informasi TPB/SDGs yang harus disampaikan kepada seluruh pihak bersamaan dengan menerima informasi berupa input untuk pemilihan indikator yang akan digunakan untuk pelaksanaan TPB/SDGs agar semua tujuan yang sudah disepakati dapat tercapai pada tahun 2030. Peneliti juga melihat bahwa serangkaian kegiatan ini menggambarkan sistem pengkomunikasian informasi penting yang dilakukan oleh pemerintah kepada seluruh pihak demi suksesnya TPB/SDGs dalam mencapai tujuan.

Salah satu asumsi mendasar teori Informasi Organisasi Weick (West dan Turner, 2008:82) yaitu organisasi berada dalam suatu lingkungan informasi. Berdasarkan asumsi tersebut, peneliti melihat bahwa organisasi yang membentuk lingkungan informasi pada sistem komunikasi terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) program SDGs Provinsi Papua diciptakan berdasarkan wewenang dan posisinya dalam struktur organisasi pemerintah yaitu cenderung lebih banyak memberitahu (*telling*). Pemerintah daerah lebih banyak menunggu intruksi dari kantor pusat yang dalam hal ini adalah Bappenas. Kesenjangan yang terjadi pada sistem komunikasi dengan metode *telling* ini adalah lambatnya *follow up* untuk beberapa hal yang membutuhkan pertimbangan dari pemerintah pusat. Provinsi Papua tidak dapat melakukan tindakan jika belum mendapatkan intruksi atau pemberitahuan.

4.2. Aliran Informasi dalam Sistem Komunikasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pada program SDGs Provinsi Papua

Arah aliran informasi dalam sistem komunikasi terkait penyusunan RAD berawal pada tingkat nasional. Peneliti menemukan bahwa aliran informasi yang terjadi memenuhi apa yang dinyatakan oleh Pace dan Faules (2018:183-184), informasi berpindah secara formal dari seseorang yang otoritasnya lebih tinggi kepada orang lain yang otoritasnya lebih rendah atau komunikasi ke bawah. Informasi penyusunan RAD berpindah secara formal dari Presiden kepada Kabinet Kerja termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui forum pertemuan. Selanjutnya informasi tersebut berpindah dari Bappenas kepada Pemerintah Daerah melalui sosialisasi, konsultasi dan fasilitasi penyusunan RAD.

Merujuk pada pernyataan Katz dan Khan (dalam Pace dan Faules, 2018:185), peneliti menemukan tiga dari lima jenis informasi yang terpenuhi dalam penelitian ini, yaitu (1) Informasi mengenai bagaimana menyusun RAD (2) Informasi mengenai dasar pemikiran untuk menyusun RAD (3) Informasi mengenai kebijakan menyusun RAD. Informasi yang mengalir dalam program SDGs) terdapat 17 (tujuh belas) tujuan. Secara garis besar informasinya adalah untuk kesejahteraan yang seimbang antara ekonomi, sosial, lingkungan dan disertai dengan tata kelola yang baik. Peneliti melihat informasi pada program SDGs dengan aliran *top down* tersebut masih terlalu umum dan ambigu. Kesenjangan yang terjadi dengan aliran komunikasi ini memperlambat proses penyusunan RAD Provinsi Papua.

Adapun salah satu kelemahan komunikasi dari atas kebawah ini adalah kurang akuratnya informasi yang diterima karena melewati beberapa rantai informan. Informasi yang

disampaikan dengan suatu bahasa yang tepat untuk satu tingkat bisa saja tidak tepat untuk tingkat paling bawah. Keterlibatan media yang merupakan salah satu pilar dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tidak terlihat jelas. Pemberitaan yang semestinya disampaikan kepada masyarakat tidak mencerminkan adanya antusias dalam menggali topik sehingga tidak ada pembahasan lebih lanjut.

4.3. Hambatan Komunikasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pada program SDGS Provinsi Papua

Berdasarkan observasi, wawancara dan studi pustaka, hambatan komunikasi yang terjadi dalam sistem komunikasi terkait penyusunan Rencana Aksi Daerah pada program SDGs adalah terkait dengan definisi bahasa dari SDGs itu sendiri. Menurut Maulana (2013:64), gangguan semantik adalah gangguan tentang bahasa terutama yang berkaitan dengan perbedaan dan pemahaman bahasa yang digunakan oleh komunikator maupun komunikan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kesalahpahaman. Kurangnya pengetahuan dan kesalahan berbahasa adalah hambatan lazim dalam interaksi sehari-hari (Rudy:2005). Dalam penelitian ini, peneliti melihat baik Staf Unit Sosial Budaya maupun Kepala Unit, masing-masing memiliki kekurangan pengetahuan terkait TPB/SDGs dan penyusunan RAD namun dengan derajat yang berbeda. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya kesalahan dalam membahasakan pentingnya melaksanakan dan menyusun RAD TPB/SDGs. Jarak fisik antara komunikator utama yaitu Bappenas dan Bappeda Provinsi Papua, menurut analisa peneliti, menjadi penghambat komunikasi sehari-hari dalam penyusunan RAD TPB/SDGs, karena setiap kali bermaksud melakukan komunikasi, sesuai

dengan birokrasi yang ada, maka perlu menyiapkan dokumen dan memastikan anggaran tersedia.

Pemahaman prinsip SDGs yaitu *Universal, Integration* dan *No-one left behind* masih belum bisa dicerna dengan baik oleh pemerintah provinsi Papua. Seharusnya program ini secara terus menerus atau berkala dilakukan sosialisasi agar proses penyusunan Rencana Aksi Daerah diketahui perkembangannya dan tidak terjadi keterlambatan.

Hambatan lain adalah tentang *timing*. Saat penyusunan Rencana Aksi Daerah program SDGs Provinsi Papua sedang dihadapkan dalam situasi Pilkada sehingga konsentrasi para pemangku kepentingan terbelah. Alokasi anggaran yang sangat terbatas menjadi hambatan tersendiri juga dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Provinsi Papua ini.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan:

1. Kesenjangan pada lingkungan informasi yang membentuk sistem komunikasi penyusunan Program SDGs Provinsi Papua terletak pada perbedaan status *sender* dan *receiver*, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun di tingkat Daerah itu sendiri. Karakteristik komunikasi dalam pemerintah menjadikan unit yang lebih tinggi cenderung memberitahu bukan mensosialisasikan. Informasi tidak dipahami dengan baik dan berimbas pada minimnya pengetahuan terkait program SDGs serta teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah. Penerapan salah satu prinsip SDGs yaitu pelibatan semua pihak atau *no-one left behind* akan

membantu Provinsi Papua/Bappeda Provinsi dalam mengurangi kesenjangan informasi antara *sender* dan *receiver* terutama pada teknis penyusunan aksi daerah.

2. Kesenjangan pada aliran komunikasi pada sistem komunikasi penyusunan Rencana Aksi Daerah pada Program SDGs Provinsi Papua terletak pada keterlibatan. Media adalah salah satu pilar pelaksana program SDGs yang dapat membantu aliran komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Namun pada kenyataannya pelibatan media hanya sebatas sebagai penyebaran berita sehingga informasi yang diterima masyarakat hanya sebatas yang dilakukan pemerintah daerah, atau dengan kata lain *top down* padahal tidak semua masyarakat paham dengan program SDGs yang telah menjadi program Nasional ini.
3. Hambatan komunikasi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah pada Program SDGs Provinsi Papua adalah hambatan semantik. Istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) diterjemahkan berbeda-beda oleh setiap level yang berdampak pada penyusunan Rencana Aksi Daerah. Hambatan ke dua selain tidak tersedianya anggaran yang dialokasikan khusus untuk program SDGs terutama biaya operasional dalam penyusunan aksi daerah, waktu yang diberikan dalam penyusunan RAD ini bertepatan dengan proses Pilkada di Provinsi Papua.

5.2. Rekomendasi

Agenda pembangunan program SDGs diakui dunia sebagai agenda pembangunan yang transformatif. Prinsip *no-one left behind* (pelibatan seluruh pihak) adalah

jalan keluar yang sudah disiapkan agar kesenjangan antara *sender* dan *receiver* dapat diminimalkan, dan semua pihak bisa saling bekerjasama serta mendukung tercapainya program SDGs. Pelibatan media lebih dari sekedar distributor informasi bisa menjadi langkah strategis dalam upaya pembuktian bahwa pelaksanaan program SDGs telah dilaksanakan secara serius, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017.

Pengemasan pesan terkait program SDGs harus disampaikan secara relevan dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat. Selain itu sosialisasi akan berdampak lebih baik jika dilakukan secara rutin dengan melibatkan pilar pelaksana program SDGs, yaitu Pemerintah, Akademisi, Dunia Usaha, Filantropi, Organisasi Masyarakat serta Media. Serta mengundang masyarakat rentan, perwakilan pemuda, perempuan dan anak-anak, difabel dan kaum marjinal.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gibson, James L. 1984. *Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses. Terjemahan Nunuk Adiarni*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hasan, Erliana. 2010. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hidayat, Dedy N. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia.
- Littlejohn, Stephen, dan Karen A. Foss. 2009. *Teori Komunikasi*, edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nasution, Zulkarimein. 1996. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nurudin. 2004. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pace, R.Wayne. dan Faules, Don F. 2018. *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Quebral, N. C. 1988. *Development Communication*. Manila: College of Agriculture University of Philippines.
- Rudy, T. May. 2005. *Komunikasi & Hubungan Masyarakat International*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, I.K., dan Azhari. 2006. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah:
1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 2. Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

*) Lain-lain:

1. Buku Saku “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, Kementerian PPN/Bappenas, 2016.
2. Panduan SDGs: Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah (INFID, 2015)
3. Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nation, 2015